

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Wacana, Dana Bantuan Parpol Meroket

## Diduga, Memuluskan Pembahasan APBD di Dewan

JAKARTA - Dana bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) di DPRD DKI diwacanakan bakal dinaikkan dua kali lipat. Wacana itu akan dituangkan ke dewan untuk meminta persetujuan. Jika terjadi kesepakatan maka dana bantuan keuangan partai politik naik 100 persen.

"Kalau bantuan keuangan di 2019 kan hanya Rp2.400 per suara. Rencananya saya minta naik menjadi Rp5.000 per suara. Nanti kami akan minta persetujuan Komisi A," ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Taufan Bakri, Kamis (14/11/2019).

Taufan menambahkan, pertimbangan kenaikan itu di antaranya adalah karena index demokrasi DKI adalah yang tertinggi dari daerah lain. Untuk itu, pemberian bantuan keuangan itu untuk kas partai. "Tidak ada dijadikan alat komoditi kepentingan untuk pembahasan anggaran sekarang. Tidak ada itu, ini kan baru wacana," kata dia.

Bukan itu saja, kata Taufan, jika hasil pertemuan dengan Komisi A nanti disetujui, maka pihaknya segera melapor ke gubernur. Nantinya, gubernur akan meminta persetujuan kepada menteri Dalam Negeri terkait kenaikan tersebut.

Besaran ini didapat dari jumlah yang sekarang sudah ditetapkan lalu dinaikkan menjadi 100 persen. "Jadi untuk penghitungan naik 100 persen itu kan sama saja Rp2.400 dikalikan 2, seharusnya Rp 4.800 per suara. Tapi kita bulatkan menjadi Rp5.000 per suara," kata Taufan.

Selain itu kata Taufan, kenaikan ini bertujuan untuk bisa membantu partai politik dalam melakukan kaderisasi partai. Padahal, secara substansi adalah untuk bisa memaksimalkan pembinaan politik di tingkat basis partai yang paling banyak di tengah-tengah masyarakat.

Hanya saja, Taufan menegaskan, saat ini anggaran bantuan keuangan partai politik yang diusulkan di dalam KUA PPAS 2020 dengan perhitungan Rp2.400 persuara ■

Total anggaran tersebut mencapai Rp13,08 miliar. "Iya yang masuk ke KUA PPAS ini segitu. Kalau menaikkan anggaran kan baru wacana saya saat pembahasan dengan komisi nanti," kata dia.

Dia mengaku, usulan dana bantuan keuangan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menanggapi hal itu, Direktur Center Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan, sudah tidak benar kalau ada alokasi anggaran bantuan keuangan partai. Sebab, penggunaannya sendiri tidak terbuka sama sekali. "Buat apa ada bantuan partai, penggunaannya juga gak jelas," kata dia.

Uchok menambahkan, bila upaya ini tetap dilakukan bisa kemungkinan upaya ini sebagai cara memuluskan pemeriksaan APBD 2020 oleh dewan. Karena masalah bantuan keuangan ini seperti jatah preman. "Kelihatan sekali seperti ada kepentingan, menaikkan dana bantuan keuangan partai," kata dia.

Seharusnya, kata Uchok, pemberian uang negara ke partai politik itu sudah harus ditiadakan. Karena sumber dananya berasal dari uang rakyat. "Kenapa tidak diberikan saja ke rakyat untuk menambah modal pembangunan. Kan langsung dirasakan manfaatnya," tukas dia. (dny)



Tidak ada dijadikan alat komoditi kepentingan untuk pembahasan anggaran sekarang".

**Taufan Bakri**  
Kepala Badan Kesbangpol  
DKI Jakarta